

JUM ANGGRIANI

**PENGAWASAN PEMERINTAH
PUSAT TERHADAP QANUN
DI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

UNPAD PRESS

352

ANG

P

**PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT
TERHADAP QANUN
DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

JUM ANGGRIANI

**PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT
TERHADAP QANUN
DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

UNPAD PRESS

iii

TIM PENGARAH

Ganjar Kurnia
Mahfud Arifin, Engkus Kuswarno
Memed Sueb

TIM EDITOR

Wilson Nadeak (Koordinator), Tuhpawana P. Sendjaja
Fatimah Djajasudarma, Benito A. Kurnani
Deni Heriyadi, Wahya, Cece Sobarna
Dian Indira

Judul : *Pengawasan Pemerintah Pusat
Terhadap Qanun di Nanggroe
Aceh Darussalam.*
Penulis : Jum Anggriani.

UNPAD PRESS
Copyright (c) 2010
ISBN 978-602-8743-20-4

PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas membuat buku ini.

Berdasarkan dari sejarah pembentukannya, Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah mendapatkan keistimewaan dalam penyelenggaraan kekuasaan di daerahnya berdasarkan ajaran-ajaran syari'at Islam. Jadi dalam membuat kebijakan daerah yang berupa Qanun harus berlandaskan syari'at Islam.

Indonesia adalah Negara kesatuan dengan sistem pemerintahannya, yang dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara, memerlukan bantuan dari daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Kewenangan ini didapat daerah melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan pengawasan Pusat terhadap Daerah.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang berupa disertasi, dan penulisannya telah disesuaikan dalam format sebuah buku. Untuk itu saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para Promotor yaitu : Prof. Dr. H Ateng Syafruddin S.H., Prof. Dr. H.R Otje Salman Soemadiningrat, S.H, dan Dr. H. Kuntana Magnar S.H., M.H, yang telah meluangkan waktu dan fikirannya untuk membantu saya menyelesaikan penulisan buku ini.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada Tim editor yang dipimpin oleh Bapak Wilson Nadeak, yang telah mengedit tulisan ini sehingga layak untuk diterbitkan dalam sebuah buku.

Buku ini diterbitkan atas bantuan Program Hibah Penulisan Disertasi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis berharap kritik dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan buku ini.

Bandung, Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	vii	
GLOSARI	ix	
BAB I	LANDASAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kerangka Pemikiran	9
	C. Metode Penelitian	41
BAB II	KAJIAN TEORITIS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	47
	A. Landasan Filosofi	47
	B. Hubungan Antara Pusat Dan Daerah	58
	C. Pengertian Peraturan Perundang- undangan	86
	D. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat	105
BAB III	SISTEM PEMERINTAHAN MALAYSIA, BRUNEI DARUSSALAM DAN DAERAH KHUSUS DI INDONESIA	115
	A. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Daerah Di Malaysia	118

	B. Sistem Pemerintahan di Brunei Darussalam	138
	C. Kedudukan Otonomi Khusus Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI	150
BAB IV	PENGAWASAN SEBAGAI PERWUJUDAN DARI WEWENANG PEMERINTAH PUSAT TERHADAP OTONOMI KHUSUS DI NAD	165
	A. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	165
	B. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perda	172
	C. Kedudukan Qanun Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di NKRI	177
	D. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Qanun di NAD	179
BAB V	PENUTUP	
	Kesimpulan	185
	DAFTAR PUSTAKA	187
	INDEKS	193